



Kuota seleksi Panwaslam belum terpenuhi

Oleh Anggraeny Prajayanti
 HARIAN JOGJA

JOGJA: Kurangnya sosialisasi mengakibatkan masih belum terpenuhinya kuota seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslam). Dari kuota minimal enam orang, hanya Kecamatan Wirobrajan yang memenuhi kuota. Karena kondisi itu, batas waktu pendaftaran pun diperpanjang dari semula hanya sampai Selasa (8/3) menjadi Jumat (11/3).

"Sepertinya empat hari kurang untuk mengurus SKCK dan surat kesehatan. Karena itu akhirnya kami perpanjang lagi," kata Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Jogja, Darmanto kepada wartawan, Selasa (8/3). Darmanto mengatakan sampai kurangnya kuota pendaftar baru terjadi tahun ini. Pada pelaksanaan pemilu belum pernah terjadi.

Dari data pendaftar yang masuk ke Panwaslu Kota Jogja hingga kemarin

baru ada 41 pendaftar padahal kuota minimal pendaftar di 14 kecamatan mencapai 84 orang atau enam orang dari masing-masing kecamatan. Dari enam orang pendaftar itu kemudian akan diseleksi dan dipilih tiga orang. Dari data, di Kecamatan Tegalarjo baru terdaftar empat orang, Danurajen satu orang, Gedongtengen dua orang, Ngampilan satu orang, Pakualaman dua orang, Mergangsari satu orang, Umbulharjo tiga orang dan Jetis tiga orang. Sedangkan di Gondokusuman baru ada tiga orang yang mendaftar, Mantriweron lima orang, Kraton tiga orang, Gondomanan empat orang dan Kotagede tiga orang. Baru dari kecamatan yang sudah mencukupi diadakan seleksi yaitu tujuh orang.

Setelah pendaftar memenuhi kuota, nantinya akan dilakukan seleksi wawancara empat hari. Nantinya setelah terpilih calon anggota panwaslam akan mendapatkan dasar penanganan pelanggaran. Jika sampai batas akhir

tanggal 11 kuota belum juga memenuhi, Panwaslu Kota Jogja akan melakukan *talentscouting* atau pencarian calon anggota Panwaslam. "Nanti kami akan mendekati orang-orang yang dirasa cukup kompeten agar mau menjadi anggota Panwaslam," lanjutnya.

Syarat menjadi anggota Panwaslam utamanya berusia minimal 35 tahun. Usia ini penting karena melakukan proses pengawasan membutuhkan kematangan emosi dan psikologis. Selain itu mereka juga harus tinggal di Jogja dan dibuktikan dengan kartu identitas serta pendidikan minimal SMA.

Ketua Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Heri Joko Setyo menambahkan mengenai honor yang diterima anggota juga sudah diumumkan jauh-jauh hari dengan harapan tidak ada keluhan di kemudian hari. "Honor kami samakan dengan PPK dari KPU yaitu Ketua sebesar Rp1 juta dan anggota Rp850.000 dengan masa kerja selama tujuh bulan," ujar Heri.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005